

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak telah tertera di perundang-undangan Negara Indonesia tentang perlindungan anak. Negara menjamin kesejahteraan warga negaranya. Begitu juga dengan anak-anak dimana hak asasi anak bagian dari hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun hingga saat ini tindak pidana terhadap anak masih belum teratasi, yang paling dominan adalah eksploitasi anak. Permasalahan yang sampai sekarang ini masih terjadi adalah anak-anak dijadikan korban untuk mengemis dijalanan. Pekerjaan ini sudah melanggar hak-hak anak, karena tidak selayaknya atau tidak sepatutnya anak-anak diberikan pekerjaan yang berdampak buruk bagi tumbuh kembangnya anak.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor-faktor pendorong terjadinya eksploitasi anak dan bagaimana penanggulangan yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya eksploitasi pada anak. Penelitian ini bersifat empiris dalam suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kinerja hukum dilingkungan masyarakat. Prosedur pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, peraturan hukum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis jalanan terdiri dari Konvensi Hak Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penganggulangan Gelandangan dan Pengemis, Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yaitu faktor internal dan eksternal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, adanya paksaan dari orang tua, tradisi atau budaya malas, pekerjaan yang menggiurkan, pengaruh lingkungan, kekerasan dalam keluarga, serta tidak mendapat perhatian kasih sayang dari orang tua. Ketiga, upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis yaitu seperti pembentukan peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak, peran pemerintah, peran lembaga swadaya masyarakat serta peran masyarakat.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Tindak pidana, Upaya Penanggulangan

ABSTRACT

Protection of children has been stated in the laws of the State of Indonesia regarding child protection. The state guarantees the welfare of its citizens. Likewise with children where children's human rights are part of human rights in the 1945 Constitution. However, until now criminal acts against children have not been resolved, the most dominant is child exploitation. The problem that is still happening is that children are victimized to beg on the streets. This work has violated children's rights, because it is inappropriate or inappropriate for children to be given jobs that have a negative impact on the child's growth and development.

The problems in this research are what are the driving factors for child exploitation and how to overcome them to minimize the exploitation of children. This research is empirical in a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. The procedure for collecting data in this research is to conduct a literature study and a field study.

The results of the conclusions of this study are first, the legal regulations regarding the exploitation of children as street beggars consist of the Convention on the Rights of the Child, the Criminal Code, Government Regulation Number 31 of 1980 concerning Combating Homeless and Beggars, Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Order. Public Order and Public Peace, Perkapolri Number 14 of 2007 concerning Combating Homeless and Beggars, Child Protection Law Number 23 of 2002, Child Protection Law Number 35 of 2014, Human Rights Law Number 39 of 1999, Law Basic 1945. Second, the factors that cause the criminal act of exploiting children as street beggars are internal and external factors such as poverty, education, coercion from parents, lazy traditions or culture, lucrative work, environmental influences, family violence, and do not get affectionate attention from parents. Third, efforts to overcome criminal acts of exploitation of children as beggars are such as the formation of regulations relating to child exploitation, the role of government, the role of non-governmental organizations and the role of the community.

Keywords: Child Exploitation, Crime, Countermeasures

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Sumber Data.....	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5. Lokasi Penelitian	12
1.6.6. Teknik Analisis Data	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG	13
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAPANAK	13

2.1.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	13
2.1.1.	Pengertian Tentang Anak.....	13
2.1.2.	Hak dan Kewajiban Anak.....	13
2.1.3.	Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	15
2.1.4.	Kajian Umum Tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan.	16
2.2.	Eksplorasi Anak.....	22
2.2.1.	Pengertian Eksplorasi Anak	22
2.2.2.	Kriteria Eksplorasi Anak.....	23
2.2.3.	Bentuk-Bentuk Eksplorasi Anak	23
2.2.4.	Dampak Dari Ekplorasi Anak.....	25
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Pengemis	26
2.3.1.	Pengertian Tentang Pengemis.....	26
2.3.2.	Jenis-Jenis Pengemis	27
2.3.3.	Faktor-Faktor Peyebab-Penyebab Terjadinya Mengemis	28
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	29
2.4.1.	Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	29
2.4.2.	Pengertian Tentang Perlindungan Anak	30
2.4.3.	Tanggungjawab Perlindungan Anak.....	33
BAB III		35
3.1.	Larangan Pengemis Anak Dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum Pidana Positif Indonesia	35
3.2.	Gambaran Fenomena Pengemis Anak di Kabupaten Bangkalan	38
3.3.	Eksplorasi Anak Pengemis dalam Prespektif Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan	41
3.3.1	Perbedaan Persepsi Dinas Sosial dan Fakta di Lapangan Terkait Pengemis Anak	41

3.3.2.	Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Pengemis	42
3.4.	Pengemis Anak di Pelabuhan Kamal.....	44
3.4.1	Gambaran Fakta Pengemis Anak di Pelabuhan Kamal	44
3.4.2	Faktor-Faktor Penyebab Mengemis di Pelabuhan Kamal	48
3.5.	Upaya Penanggulangan Pengemis Anak di Pelabuhan Ujung Kamal	51
3.5.1.	Bentuk-Bentuk Penganggulangan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial	51
3.5.2.	Kendala Penanggulangan Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial.....	53
BAB IV		55
PENUTUP		55
DAFTAR PUSTAKA		57